

Pengantar: Menyusun Policy Brief

Sumber:

Toolkit fo Researchers:

How to write a policy brief (IDRC, 2011)

- Meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam penyebaran hasil penelitian dan advokasi kebijakan

Agenda

- 15.15 – 15.30 : Pengantar
- 15.30 – 16.00 : Menyusun Policy Brief
- 16.00 - 16.45 : Diskusi contoh policy brief

Policy Brief



Policy Brief

- Berisi dasar rasional pemilihan alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini



Menyediakan argumen, mengadopsi alternatif tertentu, meyakinkan pihak target, mendorong melakukan tindakan

Kondisi saat ini

- Apakah tulisan sudah cukup mampu mempengaruhi seorang penguasa dalam mengambil suatu kebijakan?
- Jurnal dan artikel tentang kebijakan, adakah?
- *policy brief* sebagai bagian dari advokasi kebijakan.

- Tidak diimplementasikan oleh para pengambil kebijakan, antara lain karena permasalahan:
 1. pengambil kebijakan tidak tahu bahwa informasi tersebut telah tersedia
 2. tidak memahami
 3. tidak peduli (*saat ini belum masuk dalam agenda/prioritas kebijakan mereka*)
 4. Sudah tahu cara mengakses, sudah memahami, sudah masuk dalam agenda, **namun** sepenuhnya tidak setuju dengan yang ditawarkan

Bagaimana menjembatani gap: apa yang sudah diketahui dan (*know do*)

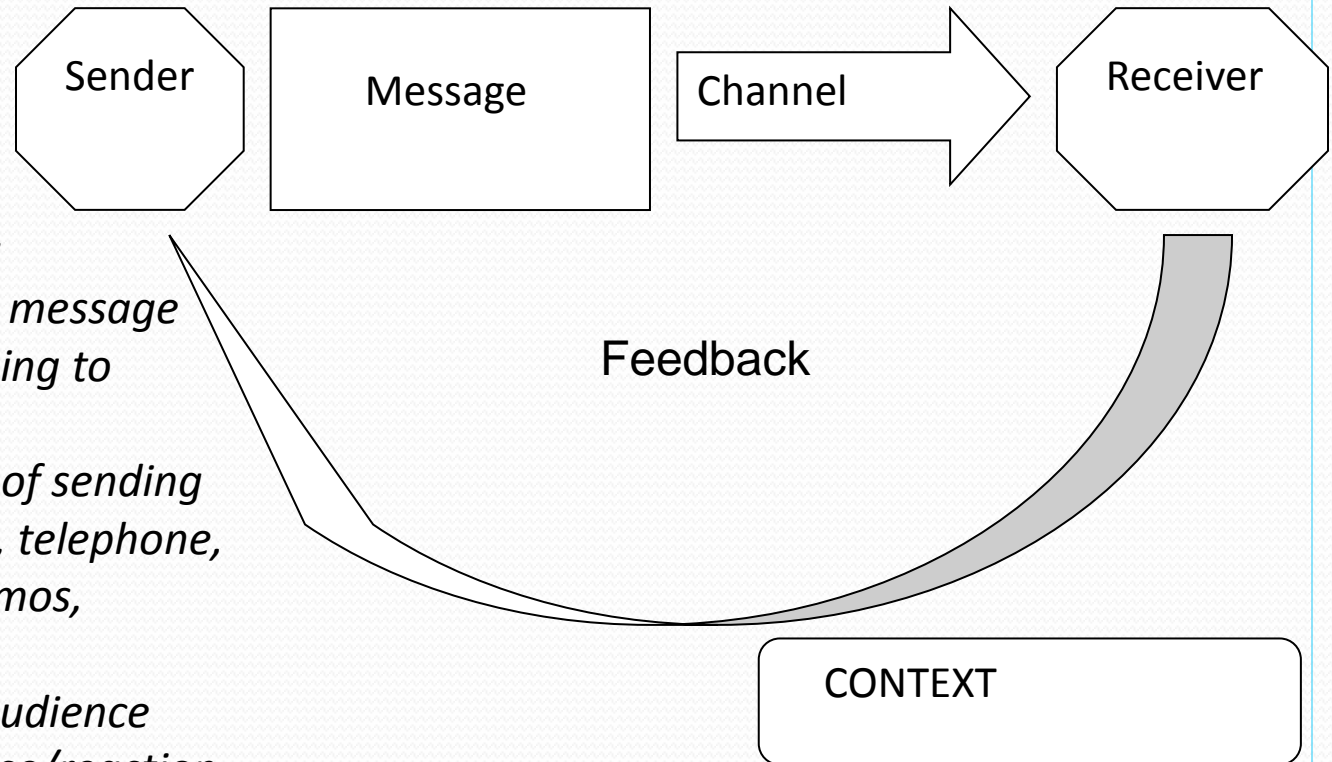
Models of Knowledge Translation

- Push efforts
- Pull efforts
- Exchange efforts
- Integrated efforts

J. Lavis, J. Lomas, M. Hamid and N. Sewankamo. “ Assessing Country-Level Efforts to Link Research to Action”. Bulletin of the World Health Organisations, 84 (2006): 620 – 28.

- Model 1: *Push efforts*, yaitu peneliti secara persuasif menyampaikan hasil penelitian kepada para pengambil kebijakan
- Model 2: *Pull efforts*, yaitu pengambil kebijakan meminta kepada para peneliti
- Model 3: *exchange effort*, dalam model ini melibatkan dua pihak dan komunikasi dua arah, ada keterlibatan para pengambil keputusan di dalam penelitian dan dilakukan diskusi tahap demi tahap dengan *policy maker*.
- Model 3: *integrated efforts*, sifatnya lebih *long term*. Model ini sedang dicoba untuk dikembangkan. Beberapa komunitas dibangun untuk menciptakan *knowledge translation* yang semakin besar.

The communications loop



- Sender: person or organization with a message
- Message: something to convey
- Channel: method of sending message (meetings, telephone, letters, e-mails, memos, reports)
- Receiver: target audience
- Feedback: response/reaction from audience
- Context: situation, circumstances, environment, culture

Channel

- *In-person*: tatap muka, konferensi/pertemuan, kunjungan lapangan, forum konsultasi, round-table discussions
- *Print*: Newsletters, brosur, memo, poster, *workspace notice boards, policy brief*
- *Electronic*: *Email, intranet, webcasts, e-newsletters, blogs, conference calls, desktop alert messages, internal social networking tools* (antara lain: Facebook)

3 lini dalam advokasi

- Lini legislatif : mendorong terciptanya payung hukum
- Lini eksekutif : mendorong perubahan tata laksana sesuai produk hukum
- Lini sosial : mobilisasi masyarakat (mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan produk hukum).

Advokasi Kebijakan

1. **INTERPERSONAL COMMUNICATION**
2. **GROUP COMMUNICATION**
3. **ORGANIZATIONAL COMMUNICATION**
(Methods: FGD, Seminar, Informal Channels)

**NEEDS
IMPROVING**

CONVENTIONAL MEDIA

1. **PRINT (Policy Brief)**
2. **MEDIA BRIEFING**
3. **BROADCAST**
(Article, News, Features)

MOST EFFECTIVE

NEW MEDIA

1. **BLOG**
2. **SITES**
3. **EMAIL**

MODERATE

Menyusun Policy Brief

Memahami Framing & Reframing

- Makna tidak melekat pada peristiwa, tapi tergantung dari arah mana kita memberi makna.
- *Proses memberikan makna disebut framing, mengubah makna yang ada disebut reframing*

FRAMING

Proses dengan sengaja membingkai suatu kalimat agar maknanya sesuai keinginan komunikator (mengeset makna).

Ada beberapa framing penting yang bisa dipakai di dalam konteks advokasi

- **Agreement Frame (AF):**

Sebuah cara membingkai pesan, diawali dengan cara sebelumnya menggiring kondisi pikiran pihak lain untuk masuk ke pikiran setuju, kemudian baru dibawa ke arah isu yang mau ditiupkan.

- **Outcome Frame (OF)**

Merupakan varian dari agreement frame, pembingkaiian dilakukan dengan cara membatasi pembicaraan dalam ruang lingkup hasil yang ingin dicapai bersama.

Perbedaannya dengan agreement frame adalah, untuk outcome frame adalah membicarakan hasil yang belum terjadi dan ingin dicapai, sedangkan agreement frame adalah membicarakan tentang topik yang sudah terjadi.

Contoh OF:

“Tentunya kita sepakat bahwa hari ini kita memiliki tujuan yang sama dalam pertemuan ini, yakni menghasilkan kemaslahatan umat, dengan demikian”

- **Contrast Frame (CF)**

Sebuah bingkai pesan yang menggunakan pendekatan ujung-ujung ekstrem suatu permasalahan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan efek kontras dari sebuah pemikiran/keputusan.

Contoh CF yang paling terkenal adalah *cost benefit analysis*

Reframing

Proses reframing adalah secara sengaja membingkai ulang suatu kalimat sehingga memiliki makna yang betul-betul berubah secara dramatis.

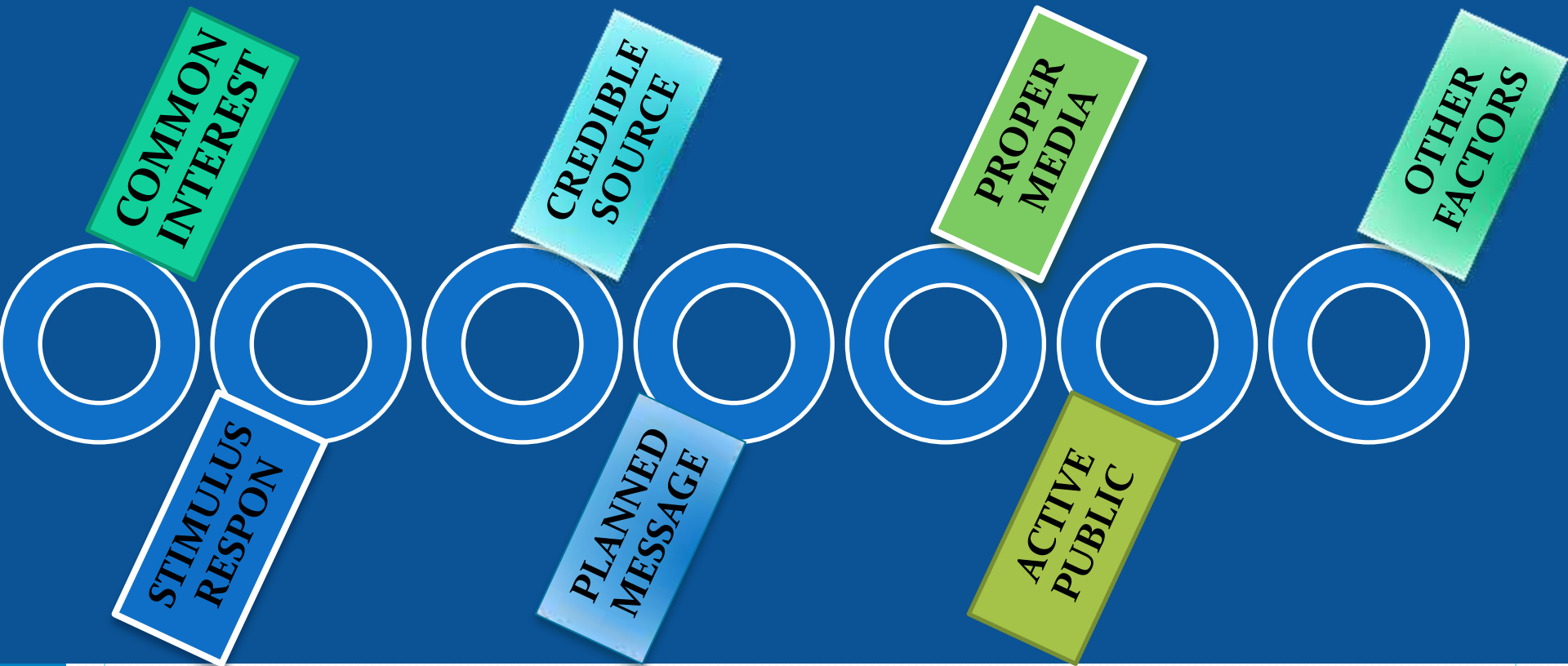
Tujuan untuk memberikan makna ulang yang berbeda, agar:

- Punya perspektif yang berbeda
- punya pilihan tindakan lain
- lebih membesarkan hati
- positive thinking
- terlepas dari keterikatan makna

Strategi Komunikasi

- Tentukan channel yg akan digunakan
- Identifikasi resources yang diperlukan
 - Material, orang, uang
- Tentukan waktu yang tepat
 - Event, policy cycle
- Mekanisme evaluasi dan feedback
 - Bagaimana Anda mengukur seberapa berhasil advokasi dari *policy brief* Anda?

Analisis Strategi Komunikasi



OTHER FACTORS → PUBLIC PRESSURES, CONSTITUTIONS, HUMAN RIGHTS VALUES, HEALTHY LIFE CULTURE, NATIONAL COMPETITIVENESS

Sebelum menulis

- Mengidentifikasi isu kebijakan
- Mengembangkan dialog dua-arah dan 'keterlibatan' dengan *beneficiary* dari manfaat riset (misalnya: pembuat kebijakan)
- Menciptakan tim komunikasi dan diseminasi
- Mengidentifikasi kelompok target audiens yang relevan

Mengidentifikasi Isu Kebijakan

- Apa isu kebijakan yang Anda angkat?
 - Relevan?
 - *Agenda Setting?*
 - Level apa yang Anda akan pengaruhi?
 - Values? Politicking?
 - Apa yg Anda ingin capai?

Mengidentifikasi Target Audiens

- Siapa target audiens yg relevan untuk isu kebijakan yang Anda angkat?
 - Siapa target audiens yang paling penting yang HARUS mendengar advokasi Anda?
 - Siapa target audiens yang SEBAIKNYA mendengar advokasi Anda?
 - *Those who can make the process easier or more difficult*
 - *Those who might indirectly help or hinder*

Mengidentifikasi Target Audiens

1. Stakeholder Analysis:

- Pemangku Kepentingan Sektor Swasta
- Pemangku Kepentingan Sektor Publik
- Pemangku Kepentingan Masyarakat Sipil
- Identifikasi pemangku kepentingan primer dan pemangku kepentingan sekunder
- Matriks Stakeholder: Interest-Power

Mengidentifikasi Target Audiens

2. Influence Mapping:

- Bedakan antara *decision-maker* dengan *influencer/opinion leaders*
- Identifikasi siapa yg bisa dipengaruhi dan bagaimana caranya

Inti isi dari *policy brief*:

Problems, Possibilities, Policies

1. Mengemukakan masalah: apa penyebab masalah, mengapa masalah terjadi
2. Menyebutkan kemungkinan-kemungkinannya apa, jika ada masalah dan berbagai kemungkinan untuk mengatasi. Apa saja strategi yang dapat dilakukan
3. Harus merekomendasikan kebijakan tertentu, kenapa kebijakan tersebut yang harus diambil.

Prinsip menulis

AIDA (*attention, interest, desire to act, action*)

- Menarik perhatian: warnanya → *eye catching*,
- Harus bisa membangkitkan interest orang
- Harus membangkitkan keinginan untuk bertindak, misal: kenapa masalah ini penting dan harus diatas
- Harus bisa mendorong aksi tertentu, tidak hanya 'dikata-katai' namun mendorong orang lain bertindak.

Menulis sebuah *Policy Brief*

- Menggunakan bahasa yang mudah dipahami
- Bagaimana kata per kata disusun, keruntutan logika dan pilihan kata
- *Avoid technical jargon*
- *Proofread, proofread, proofread*

Contoh Template

- Judul
- Ringkasan Eksekutif
- Pendahuluan
- Pendekatan yang digunakan dan Hasil
- Kesimpulan
- Implikasi dan Rekomendasi
- *Sources consulted or recommended*



✓ **model *a laser focus***
✓ **tidak lebih dari 2-4 halaman (1.500 kata)**

Merancang *Design Policy Brief*

- Judul merupakan titik acuan, dan dapat diikuti dengan sub-judul. Dalam pemilihan judul harus dipilih kata yang menarik minat pembaca.
- Dapat ditambahkan *sidebars*, yang ditulis pendek, dekritif, stimulating (menggunakan pertanyaan) dan berfokus pada tindakan
- Design dibuat menarik dengan warna atau pilihan *font*
- Dapat menggunakan grafik, foto dan grafis
- Perlunya melakukan review dokumen setelah selesai penulisan



Policy brief di Eropa



Policy brief di USA

Policy Brief

Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Indonesia



Conflict and Development Program

Edisi III

November 2010

Pola-pola Baru Kekerasan di Indonesia: Data Awal dari Enam Provinsi dengan Pengalaman Konflik Berskala Tinggi

Catatan Kebijakan Ini menyajikan bukti awal dari Studi Konflik Kekerasan di Indonesia atau Violent Conflict in Indonesia Study (VICIS), sebuah kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), JPI-Research, Program SREAS-USAID, dan Program Konflik dan Pembangunan Bank Dunia. Metodologi studi telah dipaparkan pada publikasi berikut ini:
Patrick Barron, Sara Jeffrey Blair Palmer, dan Ashutosh Venkney (2009), "Understanding Violent Conflict in Indonesia: A Mixed Methods Approach (Memahami Konflik dan Kekerasan di Indonesia: Sebuah Pendekatan Metode Campuran)", *Indonesian Social Development Paper No. 15*, Jakarta: World Bank.
Sebuah film dokumenter singkat dapat diakses pada: <http://www.youtube.com/watch?v=Ucwgq2pht4>

Dua versi Catatan Kebijakan diterbitkan oleh Program Konflik dan Pembangunan yang merupakan bagian dari Bank Dunia di Indonesia. Seri pertama, "Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Indonesia", meninjau hasil-hasil penelitian tentang konflik. Catatan kebijakan menarik pembelajaran untuk memahami dan mengatasi konflik di negara-negara lain yang berpengalaman menengah. Seri kedua, "Mengevaluasi Program Tanggap Konflik", meninjau hasil-hasil evaluasi dan penilaian program-program konflik dan metodologi terbaik dalam mengukur dampak program-program pencegahan perdamaian. Semua Catatan Kebijakan tersedia di www.conflictanddevelopment.org.

Konflik kekerasan berskala tinggi yang terjadi selama masa transisi ketika Indonesia menuju demokrasi telah dikaji secara seksama. Akan tetapi, data tentang frekuensi, bentuk, dan dampak kekerasan selama beberapa tahun terakhir kurang tersedia bagi para pembuat kebijakan. Catatan Kebijakan Ini menyajikan data awal dari Studi Konflik Kekerasan di Indonesia (VICIS), yang disusun oleh Bappenas, mengenai dinamika konflik di enam provinsi yang terkena dampak dari konflik berskala besar—Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat—selama periode 1998-2008. Hasilnya menunjukkan bahwa:

- ◆ Meluasnya konflik komunal dan separatis yang mewarnai transit demokrasi di Indonesia kini telah dapat dikatakan berakhir, setelah masa puncaknya 1999-2004. Meski demikian, berbagai faktor yang memicu dan mendorong berangam konflik tersebut belum sepenuhnya ditangani dan persoalan konflik lama kerap memicu insiden kekerasan yang baru.
- ◆ Pada enam provinsi tersebut terdapat tingkat konflik kekerasan rutin yang tinggi—yang seringkali berupa bentrokan antar kelompok geng (preman), demonstrasi politik yang berujung ricuh, pengerojukan terhadap pencuri, atau pertikaian masalah lahan. Dari bentuk-bentuk konflik kekerasan tersebut, sejak 2005 terjadi rata-rata 2.000 insiden konflik kekerasan per tahun pada enam provinsi yang dihuni hanya 4 persen dari penduduk Indonesia. Selama 2005-2008, konflik tersebut telah memelan korban tewas lebih dari 600 orang, 6.000 korban luka-luka, dan lebih dari 1.500 bangunan hancur. Mengingat meluasnya kekerasan berskala besar pada masa lalu diawali oleh insiden kekerasan berskala kecil, tingginya tingkat kekerasan rutin menandai potensi eskalasi konflik.
- ◆ Sifat konflik kekerasan di Indonesia telah mengalami perubahan secara gradual. Bila pada periode 1999-2004, isu-isu identitas melatarbelakangi kebanyakan kasus kekerasan berskala besar, kini isu moral/terminologi yang kian mengemuka, dan menyebabkan lebih dari setengah jumlah korban tewas akibat konflik pada beberapa tahun terakhir. Bentuk dari insiden kekerasan yang marak terjadi pun berubah. Meski kekerasan dan bentrokan antar-kelompok masih terjadi, frekuensinya telah berkurang, dan insiden penganiayaan dan perkelahian yang paling banyak menyebabkan korban tewas pada beberapa tahun terakhir.
- ◆ Respon aparat keamanan terhadap konflik kekerasan masih lemah. Hanya 7 persen konflik kekerasan yang terdeta dalam database selama 2005-2008 ditangani secara langsung oleh pihak militer atau kepolisian, termasuk Brimob. Konflik antar-unsur atau elemen dalam tubuh militer atau kepolisian, yang sempat menghambat efektivitas penegakan hukum selama periode konflik berskala tinggi, terus terjadi dan menyebabkan insiden yang mematikan.
- ◆ Di antara keenam provinsi tersebut di atas, Papua merupakan provinsi dengan tingkat jumlah insiden kekerasan tertinggi dan Provinsi Maluku tercatat mengalami kenaikan yang paling tajam dalam jumlah insiden kekerasan pada beberapa tahun terakhir. Di Provinsi Aceh, kekerasan separatis berakhir pada 2005, namun sebaliknya jumlah insiden terkait isu moral/terminologi justru meningkat sejak saat itu—dan kekerasan pascaperjanjian damai (penandatanganan MoU) terkonsentrasi pada wilayah yang merupakan pusat kekerasan sebelum MoU juga. Di keenam provinsi tersebut, tingkat, bentuk dan dampak konflik kekerasan sangat bervariasi antar-kabupaten. Hal ini sekaligus memperlihatkan betapa signifikannya faktor lokal dalam mendorong terjadinya insiden kekerasan.

Terdapat paksaan yang kian menguat pada pemerintah dan masyarakat madani tentang perlunya sebuah perubahan pendekatan nasional terhadap pengelolaan konflik, dari pola penanganan yang bersifat sementara (ad hoc) menjadi pengembangan sebuah kerangka kebijakan yang terpadu dan komprehensif dan mengadopsi pendekatan preventif. Beberapa inisiatif sudah mulai dilakukan untuk menyusun sebuah kerangka kebijakan tersebut, yang mencakup penyusunan draft Strategi Besar Pencegahan dan Pengelolaan Konflik (*Grand Strategy for Conflict Prevention and Management*) dan rancangan UU Pengelolaan Konflik Sosial. Temuan-temuan VICIS memberikan penegasan bahwa inisiatif dimaksud seyogyanya mempertimbangkan isu dan upaya kunci berikut ini:

- ◆ Pengembangan kerangka kebijakan yang komprehensif yang mengerucut pada faktor penyebab struktural dari konflik berskala besar pada masa lalu dan mengutamakan pengelolaan konflik kekerasan rutin untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.
- ◆ Investasi pada kegiatan pemantauan konflik secara sistematis, khususnya di wilayah 'panas' (hotspot), sebagai instrumen pendukung sistem peringatan dini.
- ◆ Upaya-upaya peningkatan kemampuan para penegak hukum agar efektif menangulangi dan menangani kekerasan. Penguatan mekanisme lokal dalam menyelesaikan sengketa untuk meningkatkan kohesi sosial masyarakat dan mencegah eskalasi konflik.
- ◆ Investasi terus-menerus pada program perdamaian perdamaian (*peace-building*) di wilayah pascakonflik, dengan mengedepankan kepemimpinan lokal.
- ◆ Partisipasi dan keterlibatan penuh para aktor lokal dalam perumusan kerangka kebijakan nasional.

Eye catching, Sidebar

PENGANTAR

Proses transisi demokrasi di Indonesia ditandai oleh serangkaian konflik kekerasan. Konflik separatist di Aceh mengalami eskalasi dan mengakibatkan ribuan korban tewas sebelum terseleskannya perjanjian damai pada 2005, dan di Papua konflik separatist masih berlanjut dengan intensitas kekerasan rendah. Konflik etnis di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Jakarta juga telah menenggat ribuan korban jiwa. Kekerasan antaragama-etnis pecah pada 1999 di Maluku dan di Maluku Utara serta pada 1998 dan 2000 di Sulawesi Tengah. Aksi-bakar Terefon, meski jarang terjadi, tetap memakan korban. Selain itu, berbagai wilayah telah terkena dampak dari konflik kekerasan rutin berskala kecil akibat persoalan perebutan sumber daya, masalah politik, dan identitas.

Konflik berskala besar telah berakhir atau setidaknya intensitasnya berkurang seiring dengan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, data tentang frekuensi, bentuk, dan dampak kekerasan selama beberapa tahun terakhir kurang tersedia bagi para pembuat kebijakan. Studi-studi kuantitatif mengenai kekerasan yang tersedia tidak mencakup periode setelah 2003. Database konflik (1990-2003) dari United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), yang sering digunakan sebagai sumber kuantitatif mengenai konflik kekerasan di Indonesia, hanya mencatat konflik antarkelompok. Mengingat banyaknya konflik kekerasan yang terjadi di Indonesia saat ini berskala kecil, yang lebih banyak melibatkan individu ketimbang

Kotak 1: Isu Konflik dan Bentuknya dalam Studi VICIS

Database VICIS mencakup seluruh insiden konflik kekerasan dan kriminalitas dengan kekerasan yang dibarengi oleh surat kabar lokal. Insiden tersebut dinyatakan sebagai konflik bila terlapat persoalan sebelum insiden tersebut terjadi, menurut belatinya. Jika tidak ada persoalan yang mendahulunya, insiden tersebut akan tercatat sebagai kriminalitas dalam database.

Insiden konflik kekerasan dalam database VICIS dihdide berdasarkan isu yang dipersoalkan dan bentuk kekerasan yang terjadi. Isu konflik tidak identik dengan penyebab kekerasan akan tetapi merupakan persoalan atau keluhan yang dibarengi sebagai dasar insiden. Insiden diberi satu atau dua tipe isu utama: sumber daya; administratif; politik; identitas; atau moral/berhimpung. Dalam setiap tipe, digunakan sub-tipe untuk memberi kategorisasi yang lebih akurat. Sebagai contoh, kategori konflik identitas mencakup sub-tipe seperti konflik etnik, agama, profesi, dan konflik identitas gender.

Untuk setiap insiden, bentuk kekerasan yang terjadi juga dinyatakan dalam kode. Bentuk-bentuk kekerasan meliputi demonstrasi, kerusuhan, pengoyokan, penganiayaan, perkelahian, bentrokan antarkelompok, dan serangan teroris. Tidak jarang sebuah insiden terdiri dari lebih dari satu bentuk kekerasan tersebut.

Peta 1: Provinsi yang terakup dalam Studi VICIS



kelompok, terdapat desakan perlunya data baru agar penyusunan kebijakan berpijak pada informasi yang akurat dan terkini mengenai dinamika konflik.

Catatan Kebijakan ini menyajikan data awal dari sebuah database yang baru mengenai konflik kekerasan di Indonesia. Studi Konflik Kekerasan di Indonesia (Violent Conflict in Indonesia Study), disebut VICIS, merekam semua insiden konflik kekerasan dan kriminalitas dengan kekerasan antara 1998 hingga 2008 sebagaimana diberitakan di surat kabar lokal. Catatan Kebijakan ini menilikibetukan pada tren dan pola konflik kekerasan di empat provinsi yang sebelumnya pernah terkena dampak kekerasan eskalatif (Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara) serta Papua dan Papua Barat, di mana terdapat gerakan separatist berskala rendah yang masih berlanjut. Catatan Kebijakan ini tidak menganalisa

- insiden kriminalitas dengan kekerasan karena akan dianalisa dalam publikasi terpisah. Pertanyaan kunci yang didiskusikan di bawah adalah:
- Bagaimana frekuensi, bentuk, dan dampak konflik kekerasan telah mengalami perubahan selama ini di provinsi-provinsi yang sebelumnya mengalami tingkat kekerasan tinggi?
 - Wilayah-wilayah mana saja yang saat ini terkena dampak paling besar akibat konflik kekerasan?
 - Seberapa besar variasi atau keragaman di antara wilayah-wilayah tersebut terkait pola baru konflik kekerasan?

METODOLOGI

VICIS bertujuan untuk mengisi kekurangan pengetahuan tentang konflik kekerasan di Indonesia untuk meningkatkan pembuatan kebijakan pengelolaan dan pencegahan konflik yang didasari data. Proyek ini terdiri atas tiga komponen:

Pemetaan pola konflik kekerasan. Komponen pertama mencakup pemetaan dataset kekerasan yang baru untuk periode 1998-2008/9 yang meliputi 16 provinsi, yang mencakup setengah dari penduduk Indonesia. Dataset VICIS mencakup semua insiden konflik kekerasan dan kriminalitas dengan kekerasan yang dilaporkan lebih dari 150 surat kabar lokal (karen tingkat provinsi dan kabupaten). Data ini diperkuat dan dicik dengan data dan sumber sekunder termasuk database UNSFIR, daftar insiden akademis. VICIS menggunakan definisi konflik kekerasan yang luas,

Grifik, grafis

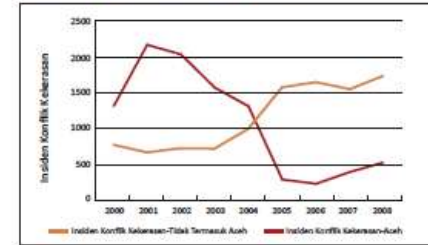
TEMUAN

Temuan utama dari komponen kuantitatif VICIS—berdasarkan data konflik yang dikumpulkan dari enam provinsi (Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat)—adalah sebagai berikut:

Korban tewas akibat konflik di enam provinsi itu telah mengalami penurunan secara signifikan sejak 2005. Konflik kekerasan memuncak pada 1999 ketika jumlah korban tewas diperkirakan mencapai 3.200 orang di keenam provinsi tersebut. Terdapat penurunan drastis dalam jumlah korban tewas akibat konflik di Sulawesi Tengah dan Maluku sejak 2001. Konflik di Aceh bertambah berat selama periode 2001-2002 dan mengakibatkan sekitar 2.400 korban tewas per tahun. Namun, sejak perjanjian damai antara Pemerintah Pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditanandatangani pada Agustus 2005 (MoU, Memorandum of Understanding), jumlah korban tewas akibat konflik menurun dengan tajam (lihat Grifik 1).

Meski demikian, banyak isu terkait konflik kekerasan berskala besar belum sepenuhnya ditangani, akibatnya insiden-insiden masih tetap terjadi dan terdapat resiko eskalasi di masa mendatang. Para analis kasus-

Grifik 2: Insiden Konflik Kekerasan pada 2000-2008



kasus konflik berskala besar telah memampakan sejumlah isu yang ikut mendorong kekerasan atau memicu eskalasi kekerasan waktu itu. Isu tersebut mencakup: pergolakan politik terkait berakhirnya era pemerintahan otoriter; transisi menuju demokrasi dan desentralisasi; persaingan memperebutkan akses sumber daya alam seperti tanah, lemah dan blok kondisinya pengalasan hukum dan lemahnya respon aparat keamanan terhadap konflik; penciptaan dan eksploitasi identitas berdasarkan etnis atau agama oleh elite politik untuk

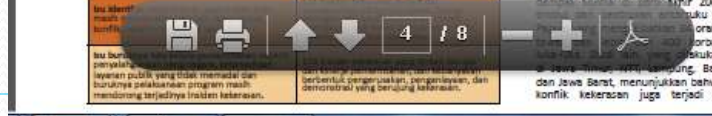
tujuan tertentu; korupsi luas dan buruknya tata kelola pemerintahan (contoh Bertrand 2004; Siel 2006; Van Klinken 2007). Meski kekerasan berskala besar telah berakhir, namun masih banyak di antara isu-isu ini terus menerus mengakibatkan konflik kekerasan, sekalipun dalam skala yang lebih kecil (Tabel 1).

Jumlah konflik kekerasan di enam provinsi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Di luar Provinsi Aceh, jumlah konflik kekerasan meningkat dua kali lipat pada 2008 dibanding 2004. (Aceh tidak dimasukkan karena pada 2004 kekerasan berskala besar masih berlangsung). Demikian juga, selama pascapenandatanganan perjanjian damai di Aceh, jumlah insiden kekerasan rutin (tidak terkait dengan konflik separatist) meningkat dari 200 kasus pada 2006 menjadi lebih dari 500 kasus pada 2008 (Grifik 2).

Meski jumlah korban tewas akibat kekerasan komunal berskala besar telah berkurang, konflik kekerasan rutin yang makin meluas berdampak signifikan. Sejak 2006, terdapat rata-rata 200 korban tewas dan 2.400 korban luka-luka setiap tahun akibat konflik di enam provinsi, yang diuhni hanya 4 persen penduduk Indonesia (Grifik 3). Lonjakan tajam terkait dengan konflik kekerasan tahun 2006 di Provinsi Maluku dan Maluku Utara di Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Bali, dan Jawa Barat, menunjukkan bahwa konflik kekerasan juga terjadi di

Tabel 1: Isu Konflik Lama dan Kekerasan Baru

Isu utama di balik kekerasan berskala besar yang muncul kembali	Kekerasan terkait di enam provinsi selama 2006-2008
Desentralisasi dan desentralisasi tetap menjadi penyebab konflik. Penyerahan kepada daerah (pillage) dan pemerkaran kerap kali mendorong konflik kekerasan, yang sering melibatkan mobilisasi organisasi-organisasi berbasis etnis atau agama.	103 insiden kekerasan terkait pilkada/pertua dan 11 korban tewas akibat permasalahan pemerintahan. Bentuk-bentuk kekerasan politik, terutama yang politis, sering terjadi akibat pengumpulan, pengalihan, dan demonstrasi yang berskala kekerasan.
Konflik terkait sumber daya, seperti konflik antarindividu dan kelompok yang memperebutkan lahan, sumber daya alam, akses pada pekerjaan, pasar, dan lahan lain yang memunculkan konflik kekerasan.	294 insiden kekerasan dari 35 korban tewas, dengan konflik banyak yang saling berhadapan hukum (57 korban tewas) atau pelanggaran moral (20 korban tewas), serta lima kasus terdapatnya atau malu / berhimpung muda (130 korban tewas). Insiden terkait isu moral terdapatnya, kebanyakan terjadi dalam bentuk pengalihan atau pengoyokan.
Persoalan terkait efektivitas penegakan hukum tetap muncul, karena respon aparat keamanan dan penegak hukum mangk isu tidak efektif. Dalam banyak kasus kekerasan digunakan untuk menyalakan keluhan kecil atau untuk 'membakar' insiden.	1212 insiden kekerasan terjadi akibat reaksi terhadap isu yang sedang dipertanyakan hukum (57 korban tewas) atau pelanggaran moral (20 korban tewas), serta lima kasus terdapatnya atau malu / berhimpung muda (130 korban tewas). Insiden terkait isu moral terdapatnya, kebanyakan terjadi dalam bentuk pengalihan atau pengoyokan.
Isu identitas masih menjadi konflik kekerasan.	10 insiden kekerasan dari 10 korban tewas, dengan konflik banyak yang saling berhadapan hukum (57 korban tewas) atau pelanggaran moral (20 korban tewas), serta lima kasus terdapatnya atau malu / berhimpung muda (130 korban tewas). Insiden terkait isu moral terdapatnya, kebanyakan terjadi dalam bentuk pengalihan atau pengoyokan.
Isu budaya, seperti pertikaian. Wawasan politik yang tidak memadai dan buruknya pelaksanaan program masih mendorong terjadinya insiden kekerasan.	10 insiden kekerasan dari 10 korban tewas, dengan konflik banyak yang saling berhadapan hukum (57 korban tewas) atau pelanggaran moral (20 korban tewas), serta lima kasus terdapatnya atau malu / berhimpung muda (130 korban tewas). Insiden terkait isu moral terdapatnya, kebanyakan terjadi dalam bentuk pengalihan atau pengoyokan.



Gambar / Foto



Diskusi (*contoh policy brief*)

- Apa isu yang diangkat?
- Mengapa isu itu diangkat?
- Rekomendasi apa yang diberikan?
- Beri contoh fakta, data, atau bukti yang membenarkan/memperkuat rekomendasi?

Diskusi (*contoh policy brief*)

- Elemen atau ide apa yang paling menempel dalam pikiran anda? Mengapa?
- Apa yang Anda sukai dari *policy brief* tersebut?
- Apa isi dari *policy brief* tersebut yang masih mungkin diperkuat?
- Apa yang Anda sukai dari format/desain *policy brief* tersebut?
- Apa format/desain dari *policy brief* itu masih mungkin ditingkatkan?

Apakah *policy brief* sudah efektif

- Apakah sudah punya target audiens yang jelas
- Apakah sudah mengatasi masalah bagi orang-orang yang belum tahu: membuat yang rumit menjadi sangat sederhana
- Apakah sudah mengakomodasi orang-orang yang tidak peduli, orang-orang dengan *interest* rendah
- Menjawab orang yang tidak sepakat

Latihan : PR

- Susun draft singkat inti Policy Brief yg terdiri dari 3P: *problem, possibilities, policy*:
 - Pengantar/latar belakang masalah (1 – 2 paragraf): *problem's cause, why change is important*
 - Berbagai evidences yang ada, yang perlu diketahui decision-maker untuk membuat keputusan (2-3 paragraf) : *analysis of the problem*
 - Kebijakan yang disarankan, apa langkah-langkahnya dan apa implikasinya (1-2 paragraf) : *siapa yang bisa dan seharusnya bertindak, apa solusi yang direkomendasikan dan apa langkah-langkah untuk menuju ke kebijakan tersebut (para pengambil kebijakan bukan orang yang 'know all')*

Bahan Bacaan

- **Implementation research evidence uptake and use for policy-making** (*Health Research Policy and Systems 2012, 10:20*)
- **Yes, research can inform health policy; but can we bridge the ‘Do-Knowing It’s Been Done’ gap?** (*Health Research Policy and Systems 2011, 9:23*)
- **Tools for Policy Impact - A Handbook for Researchers** (ODI, 2004)
- **What Difference does a Policy Brief Make?** Penelope Beynon, Christelle Chapoy, Marie Gaarder and Edoardo Masset (August 2012)